



**PROGRAM PRIORITAS JANGKA PENDEK PEMERINTAH PROVINSI BALI  
IMPLEMENTASI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA  
Melalui VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”  
“MEWUJUDKAN BALI ERA BARU ”**

# BALI

**3 KOMPONEN UTAMA  
BALI**

ALAM BALI

KRAMA/  
MANUSIA BALI

KEBUDAYAAN  
BALI

**CARA PANDANG  
MENURUT DIMENSI WAKTU  
TRI SEMAYA**

ATITA  
MASA LALU

ANAGATA  
MASA KINI

WARTAMANA  
MASA DATANG

**ALUR KONSEP**

TESIS

ANTITESIS

SINTESIS

**ALUR UNTAIAN  
PROSES/PERKEMBANGAN**

ROMANTIKA

DINAMIKA

DIALEKTIKA

**MENUJU BALI  
ERA BARU**

DIMENSI 1

DIMENSI 2

DIMENSI 3

# I. VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BALI TAHUN 2018 - 2023

## A. VISI :

ꦠꦤ꧀ꦒꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦺꦏꦨꦭꦶ

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”**

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Yang mengandung makna;

***“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”***

# I. VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BALI TAHUN 2018 - 2023

## B. MISI :

Dalam Mewujudkan VISI tersebut ditempuh melalui 22 (dua puluh dua) MISI Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana.

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.

# I. VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BALI TAHUN 2018 - 2023

## B. MISI :

7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara *sakala dan niskala* berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih*.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*.

# I. VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BALI TAHUN 2018 - 2023

## B. MISI :

13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding* Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.

# I. VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BALI TAHUN 2018 - 2023

## B. MISI :

20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, **hijau, indah, dan bersih**.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

# I. VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BALI TAHUN 2018 - 2023

## C. MENUJU BALI ERA BARU :

Dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana, untuk mengantarkan Bali menuju Era Baru yaitu :

Suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; ***Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi;***

Yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3(tiga) dimensi utama:

- ❑ **Dimensi pertama**, bisa menjaga/memelihara keseimbangan **Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*)**;
- ❑ **Dimensi kedua**, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi **Krama Bali** dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- ❑ **Dimensi ketiga**, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Dimensi ketiga merupakan suatu manajemen resiko (*risk management*) dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan dan tantangan baru di masa yang akan datang.



# I. VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BALI TAHUN 2018 - 2023

## D. PROGRAM :

Sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Bali sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka arah kebijakan dan program Pembangunan Bali Tahun 2018-2023 sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana yang dituangkan dalam 2 kelompok program yaitu, **Program Prioritas dan Program Pendukung** yang mencakup hulu sampai hilir.

### PROGRAM PRIORITAS MENCAKUP 5 BIDANG

Bidang 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Bidang 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Bidang 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Bidang 5 : Pariwisata

Pembangunan 5 Bidang Prioritas tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali dan pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.

## II. BIDANG LEGISLASI

### A. PENYUSUNAN DRAFT RUU

1. Revisi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, NTB, dan NTT menjadi Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

### B. PENYUSUNAN DRAFT RAPERDA PRIORITAS DALAM JANGKA PENDEK

1. Raperda tentang Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009-2029 (**harus selesai bulan desember**).
2. Raperda tentang Desa Adat (**harus selesai bulan desember**).
3. Raperda tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023.
4. Raperda tentang Kontribusi Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) untuk Pemajuan Kebudayaan Bali.
5. Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Bali.
6. Raperda tentang Standarisasi Pelayanan Kepariwisataaan.
7. Raperda tentang Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
8. Raperda tentang Sepeda Motor Listrik dan Mobil Listrik.
9. Raperda tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun.
10. Raperda tentang Pelindungan dan Pengaturan Hasil Karya Budaya Bali (Hak Cipta, Hak Paten, Arsitektur Bali, Tari-tarian Bali, dan Sastra Bali).

## II. BIDANG LEGISLASI

### C. PENYUSUNAN DRAFT RAPERGUB PRIORITAS DALAM JANGKA PENDEK

1. Rapergub tentang Penggunaan Busana Adat Bali (**sudah selesai**).
2. Rapergub tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali (**sudah selesai**).
3. *Ranpergub tentang Mekanisme Pengalokasian dan Pengelolaan Bantuan Dana kepada **Desa Pakraman/Desa Adat***
4. Rapergub tentang Kewajiban Hotel dan Restoran menggunakan Produk Pertanian Lokal Bali dan Kerajinan Rakyat Bali.
5. Rapergub tentang Pelaksanaan Nilai – Nilai *Sad Kertih: Atma Kertih, Danu Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.*
6. Rapergub tentang Pelindungan Tenaga Kerja Lokal.
7. Rapergub tentang Pelindungan/Penyelematan/Konservasi Pantai, Sungai, Danau, Air Terjun, Sumber Mata Air, Daerah Resapan Air, Bulakan, dan Bawah Tanah.
8. Rapergub tentang Pengendalian Pasar/Toko Modern Berjaringan.
9. Rapergub tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Plastik.
10. Rapergub tentang Pengelolaan Sampah.
11. Rapergub tentang Bali sebagai Pulau dengan Energi Bersih dan Hijau.
12. Rapergub tentang Pelindungan, Pembudidayaan Tanaman sebagai Taman Gumi Banten dan Usadha/Herbal.
13. Rapergub tentang Penggunaan Pengobatan Alternatif Tradisional Bali di Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan.
14. Rapergub tentang Pemanfaatan, Pelindungan, Pembudidayaan Pohon/Tanaman Lokal Bali sebagai Pohon/Penghijau di Bahu Jalan Raya dan *Telajakan*.
15. Rapergub tentang Pelindungan Terhadap Pura, *Pratima, Pelaba Pura* (aset Pura), dan Simbol-simbol Keagamaan yang Sakral.
16. Rapergub tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
17. Rapergub tentang Pendidikan Berbasis Keagamaan Hindu dan Berbahasa Bali.

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SKEMA PENDANAAN	SKPD
1.	<p><b>Bidang Pangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan jenis Industri Pangan dan Lokasi.</li> <li>2. Membangun sentra buah-buahan di Denpasar, Badung dan Kabupaten lainnya sesuai potensi masing-masing.</li> <li>3. Membangun sentra ikan di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem</li> <li>4. Membangun sentra daging di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.</li> <li>5. Membangun Taman Gumi Banten/Tanaman Langka.</li> <li>6. Membangun Tanaman Usadha Bali.</li> <li>7. Membangun Taman Puspa Dewata.</li> <li>8. Membangun Kebun Raya di Kawasan Pura Dalem Balingkang, Kintamani, Bangli.</li> <li>9. Membangun :               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Taman Mangrove di Kawasan Hutan Raya Ngurah Rai dan Wilayah Benoa.</li> <li><input type="checkbox"/> Kebun Raya di Kawasan Pura Dalem Balingkang, Bangli.</li> <li><input type="checkbox"/> Kebun Raya di Buleleng.</li> <li><input type="checkbox"/> Kebun Raya di Tabanan.</li> <li><input type="checkbox"/> Kebun Raya di Badung.</li> <li><input type="checkbox"/> Kebun Raya di Klungkung.</li> <li><input type="checkbox"/> Kebun Raya di Karangasem.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Tanaman Pangan</li> <li>2. Dinas Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Dinas Peternakan.</li> </ol>

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SKEMA PENDANAAN	SKPD
<b>2.</b>	<p><b>Bidang Sandang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan, pemberdayaan dan fasilitasi industri kerajinan rakyat.</li> <li>2. Pengembangan industri kerajinan rakyat berbasis budaya <i>branding</i> Bali, produk unggulan yang berorientasi ekspor Penentuan jenis dan lokasi industri unggulan.</li> <li>3. Memfasilitasi pelaku industri memperoleh HAKI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Dinas Koperasi UKM</li> </ol>
<b>3.</b>	<p><b>Bidang Papan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan memperoleh bantuan rumah susun untuk IHDN dan ISI kepada Kementerian PUPR (Dirjen Permukiman).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
4.	<p><b>Bidang Pendidikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.</li> <li>2. Persiapan pelaksanaan program Pendidikan berbasis keagamaan di Desa Adat, Pendidikan PAUD/TK, Dasar dan Menengah.</li> <li>3. Persiapan pendirian akademi komunitas di Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem (Pendidikan Vokasi).</li> <li>4. Pengembangan pendidikan SMK 4 tahun (setara diploma I)</li> <li>5. Pengembangan pendidikan SMK Kewirausahaan.</li> <li>6. Menyiapkan SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).</li> <li>7. Menyiapkan program kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri.</li> <li>8. Pembentukan Tim Penyusun Pengembangan SDM Bali Unggul               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun konsep SDM Bali Unggul</li> <li>• Pengembangan Sistem Pendidikan di sekolah, di Desa Adat dan di masyarakat</li> <li>• Pengembangan kurikulum dan bahan ajar untuk peserta didik dan pendidik</li> </ul> </li> <li>9. Penyusunan pedoman pelaksanaan PPDB tahun 2019.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
5.	<p><b>Bidang Kesehatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Pengkajian Jaminan Kesehatan yang diterapkan dengan JKBM dan JKN menuju sistem Jaminan yang baru               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis layanan JKBM versus JKN</li> <li>• Sharing Pendanaan</li> <li>• Kemudahan dalam pelayanan</li> </ul> </li> <li>2. Membentuk Tim Standarisasi Pelayanan Kesehatan               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Kualitas Pelayanan</li> <li>• Mengintegrasikan pelayanan RSUD dan RS Swasta dalam satu sistem</li> <li>• Sarana prasarana dan infrastruktur (Alkes)</li> <li>• Tenaga medis dan para medis</li> <li>• Database riwayat kesehatan Krama Bali berbasis di Puskesmas</li> </ul> </li> <li>3. Membentuk Tim Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Usada Bali).</li> <li>4. Peningkatan kualitas RSBM menjadi RS Internasional.</li> <li>5. Menyiapkan program pendidikan dokter spesialis anak dan kandungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	
6.	<p><b>Bidang Jaminan Sosial</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggungan bagi veteran dan orang lanjut usia (hari tua)</li> <li>2. Kebijakan pemberian bantuan <i>upakara pitra yadnya</i> (ngaben gotong-royong) sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>3. Kebijakan pelayanan akta kelahiran bagi anak baru lahir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
7.	<p><b>Bidang Ketenagakerjaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan perlindungan tenaga kerja lokal</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja melalui inkubator bisnis dan pendidikan/pelatihan kerja</li> <li>3. Fasilitasi akses memperoleh kesempatan kerja di luar Bali</li> <li>4. Membuka kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan Pemda luar Bali, Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Asing</li> <li>5. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai kebutuhan pasar kerja</li> <li>6. Memfasilitasi bantuan dengan bunga sangat rendah melalui BPD Bali bagi tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri</li> <li>7. Program peningkatan kegiatan bursa tenaga kerja, melalui perluasan dan peningkatan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta peningkatan frekuensi pelaksanaan yang bersinergi dengan para pihak terkait.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	



# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
8.	<p><b>Bidang Adat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan Kantor MUDP yang representatif termasuk sarana prasarana penunjang operasional.</li> <li>2. Mengintruksikan kepada Bupati/Walikota untuk menyediakan Kantor MMDP yang representatif termasuk sarana prasarana penunjang operasional.</li> <li>3. Pendidikan dan pelatihan Prajuru Desa Adat kerjasama dengan UNHI.</li> <li>4. Pendidikan dan pelatihan Pacalang kerjasama dengan Polda Bali/Polres se-Bali.</li> <li>5. Pelatihan manajemen bagi pengurus LPD bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Mengevaluasi keberadaan Lembaga Pembina LPD; diperkuat atau ditutup.</li> <li>7. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Sekeha Teruna dan Pacalang tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.</li> <li>8. Fasilitasi pembentukan Lembaga Perekonomian Desa Adat; BUMDA, Koperasi, dan Unit Usaha lainnya.</li> <li>9. Evaluasi penggunaan dana bantuan Desa Pakraman dan menyusun petunjuk teknis yang baru.</li> <li>10. Menyiapkan kebijakan tatanan kehidupan Krama Bali sesuai dengan <i>Sad Kertih : Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih</i> secara <i>sakala</i> dan <i>niskala</i>. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjabaran isi secara detail</li> <li>• Kebijakan dan program</li> <li>• Panduan tata cara pelaksanaan (SOP)</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
9.	<p><b>Bidang Agama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk <i>Sabha Purohita</i>.</li> <li>2. Membentuk Tim Penyusun Program Perlindungan Kawasan Suci Besakih : <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan</i>.</li> <li>3. Membentuk Tim Penyusun materi pendidikan terintegrasi muatan lokal Bali yang meliputi pengetahuan agama, adat, tradisi, seni dan budaya; termasuk pendidikan bahasa, aksara, dan sastra Bali bagi anak-anak usia sekolah untuk di sekolah, di Desa Adat dan di masyarakat.</li> <li>4. Membentuk Tim Penyusun evaluasi pendidikan agama Hindu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah</li> <li>5. Bekerjasama dengan Parisada dan MUDP menyelenggarakan program pendidikan terintegrasi yang meliputi pengetahuan agama, adat, tradisi, seni dan budaya bagi anak-anak usia sekolah untuk di sekolah, Desa Adat dan masyarakat serta media penyiaran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
10.	<p><b>Bidang Budaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Penyusun Program Pemajuan Kebudayaan dan kebutuhan sarana prasarana serta infrastruktur dan anggaran.</li> <li>2. Pembentukan Tim Penyusun Konsep Pusat Kebudayaan Bali dan Museum Tematik (Museum Tari, Museum Gamelan/Musik Bali, Museum Arsitektur Bali, Museum Tenun Bali, Museum Seni Rupa/Seni Lukis); menyiapkan konsultan.</li> <li>3. Evaluasi penyelenggaraan PKB, Bali Mandara Mahalango dan Bali Mandara Nawa Natya.</li> <li>4. Pembentukan Tim Penyusun Program Festival Seni Modern (Seni Bali Masa Kini) dan Tim Penyusun Program Bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali</li> <li>5. Pembentukan Tim Perekrutan Guru Kontrak; termasuk peningkatan tenaga penyuluh Bahasa Bali untuk mengajar agama Hindu, adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; termasuk pendidikan bahasa, aksara, dan sastra Bali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
11.	<p><b>Bidang Pariwisata</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Penyusun Standarisasi Pelayanan Kepariwisataaan yang meliputi; keimigrasian, bea cukai, kualitas jasa transportasi, akomodasi hotel, restoran, infrastruktur menuju destinasi wisata, kualitas objek wisata, keamanan, kenyamanan, pelayanan kesehatan bagi wisatawan, perlindungan bagi wisatawan, kualitas pemandu wisatawan/guide.</li> <li>2. Pembentukan Tim Penyusun Program Kontribusi Wisatawan (mancanegara dan domestik) untuk Pemajuan Kebudayaan.</li> <li>3. Kebijakan yang mewajibkan hotel dan restoran menggunakan produk pertanian dan kerajinan rakyat lokal Bali, serta mempromosikan industri kreatif Bali.</li> <li>4. Mengembangkan objek-objek dan kawasan wisata baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota.</li> <li>5. Mensinergikan promosi pariwisata Kabupaten/Kota se-Bali ke luar negeri dan memperkuat branding Bali.</li> <li>6. Pembentukan Tim Penyusun sistem (termasuk pengembangan materi tes) rekrutmen pemandu wisatawan/guide yang berpihak kepada SDM Bali yang mengutamakan kompetensi lokal Bali, penguasaan bahasa asing, etika, dan estetika.</li> <li>7. Menyelenggarakan diklat peningkatan kompetensi pemandu wisatawan/guide secara gratis yang dilaksanakan secara bersinergi dengan para pemangku kepentingan pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
11.	<p><b>Bidang Pariwisata</b></p> <p>8. Menerapkan kebijakan pengetatan dengan ekstra kuat pemberian rekomendasi perijinan hotel dan akomodasi pariwisata di wilayah Denpasar dan Badung.</p> <p>9. Menyelenggarakan operasi gabungan untuk menertibkan praktek-praktek pariwisata ilegal dan/atau atraksi para wisatawan di hotel/restauran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Bali.</p>		
12.	<p><b>Bidang Infrastruktur</b></p> <p>1. Membentuk Tim Penyusun Master Plan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi</li> </ul> <p>2. Pembangunan/peningkatan infrastruktur darat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penyelesaian jalan singkat/<i>short cut</i> Singaraja – Denpasar</li> <li>• Jalan singkat/<i>short cut</i>/tol Denpasar-Gilimanuk</li> <li>• Pengembangan jalan arteri Prof. Ida Bagus Mantra menjadi jalan arteri lingkaran Bali</li> <li>• Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai dan Bandara baru di Buleleng</li> </ul> <p>3. Pembangunan infrastruktur kereta api lingkaran Bali</p> <p>4. Pembangunan/peningkatan infrastruktur laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas pelabuhan bongkar muat di Celukan Bawang</li> <li>• Pembangunan pelabuhan kapal pesiar di Celukan Bawang</li> <li>• Pengembangan pelabuhan kapal pesiar di Benoa</li> <li>• Pengembangan pelabuhan kapal pesiar di Tanah Ampo/Amed</li> </ul> <p>5. Pembangunan Bandara baru di Buleleng.</p>	<p>1. APBN</p> <p>2. APBD Pov.</p> <p>3. APBD Kab./Kota</p> <p>4. Investasi</p> <p>5. Sumber lain</p>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
13.	<p><b>Bidang Energi Listrik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan kebijakan pembangunan/pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar gas atau energi baru terbarukan.</li> <li>2. Pengembangan pembangkit tenaga listrik di Celukan Bawang dengan menggunakan bahan bakar gas.</li> <li>3. Mengkonversi penggunaan bahan bakar batu bara dan disel menjadi bahan bakar gas untuk semua pembangkit tenaga listrik yang sudah beroperasi di Bali, dalam waktu paling lama 2 tahun.</li> <li>4. Pembangunan pembangkit tenaga listrik baru untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang bagi masyarakat Bali dan pariwisata serta dunia usaha dan industri.</li> <li>5. Membentuk Tim guna melaksanakan program sebagai tindaklanjut dari <b>MoU</b> yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018 di Kampus UNUD Jimbaran antara pemerintah provinsi Bali dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BPESDM Kementerian ESDM tentang Pengembangan SDM Bidang ESDM,</li> <li>2) PT. Indonesia Power tentang Program Pengembangan Insfrastruktur distribusi Gas dan Energi Baru Terbarukan (<i>Renewable Energy</i>) untuk mendukung program pemerintah provinsi Bali menuju Bali bersih dan provinsi hijau (<i>Bali Clean and Green Province</i>)</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
<b>13.</b>	<p><b>Bidang Energi Listrik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3) PT. Pertamina (Persero) tentang sinergi pengembangan dan pemanfaatan teknologi berbasis energi bersih (<i>clean energy</i>) pada kawasan pulau Bali dalam mendukung program Bali bersih dan provinsi hijau (<i>Bali Clean and Green Province</i>)</li> <li>4) PT. PLN (Persero) tentang penyediaan dan pengolahan sampah untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di TPA Regional Sarbagita</li> <li>5) PT. PLN (Persero) tentang sinergi pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan di wilayah provinsi Bali</li> <li>6. Menyiapkan skema penyediaan kebutuhan listrik untuk wilayah khusus; Nusa Penida/Nusa Lembongan, daerah terpencil/pegunungan, dan sejenisnya.</li> </ul>		
<b>14.</b>	<p><b>Bidang Air Bersih</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim penyusun master plan pengelolaan air bersih.</li> <li>2. Kebijakan pemenuhan kebutuhan air bersih : sumber, distribusi, dan layanan untuk masyarakat umum, serta skema penyediaan air bersih untuk mendukung pariwisata, dan wilayah khusus seperti Nusa Penida/Nusa Lembongan, daerah kering, daerah terpencil dan sejenisnya.</li> <li>3. Membentuk unit usaha di Perusda yang khusus mengelola air bersih untuk didistribusikan ke PDAM Kabupaten/Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ul>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
15.	<p><b>Bidang Perekonomian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Rangka Memacu Pertumbuhan Ekonomi perlu dibangun/dikembangkan pusat-pusat perekonomian yang baru:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan/pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota se-Bali</li> <li>b. Pembangunan industri kreatif berbasis budaya <i>branding</i> Bali yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali.</li> <li>c. Pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali.</li> <li>d. Pembangunan kawasan perekonomian untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Gianyar.</li> <li>e. Pembangunan taman kunjungan wisata (seperti <i>Disneyland dan Universal Studio</i>) di Kabupaten Jembrana/Buleleng.</li> </ol> </li> <li>2. Menyiapkan skema penyertaan modal pemerintah provinsi Bali di BPD Bali agar menjadi pemegang saham mayoritas.</li> <li>3. Memperkuat kedudukan dan fungsi BPD Bali sebagai pilar kekuatan pendukung pembangunan perekonomian Bali.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menata BPD Bali secara komprehensif.</li> <li>b. Mengembangkan BPD Bali sebagai Perseroan Terbuka untuk memperbesar modal dan memperluas skala usaha.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	



# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
15.	<p><b>Bidang Perekonomian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mendorong BPD Bali bersinergi dengan LPD Desa Pakraman/ Desa Adat Se-Bali memberi modal pendirian BUMDES Desa Pakraman/Desa Adat yang berpenampilan dengan tata kelola pasar modern seperti <i>Alfamart</i>.</li> <li>d. Mengarahkan BPD Bali untuk mendukung permodalan unit-unit usaha ekonomi rakyat (sektor informal) yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat.</li> </ul> <p>4. Memperkuat Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas SDM;</li> <li>b. Pengembangan unit usaha sesuai potensi Kabupaten/Kota;</li> <li>c. Memberi akses permodalan;</li> <li>d. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;</li> <li>e. Membuka akses pemasaran dengan kerjasama antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia;</li> <li>f. Membuka akses pemasaran di luar negeri;</li> <li>g. Membentuk koperasi / lembaga penjamin bagi produk-produk/komoditas lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ul>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
16.	<p><b>Bidang Transportasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi program transportasi publik Trans Sarbagita.</li> <li>2. Membentuk Tim untuk mengembangkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) moda transportasi umum antar Kabupaten/Kota</li> <li>2) moda transportasi pada kawasan padat wisatawan seperti; Kuta, Nusa Dua, Ubud, Sanur, dan jalur lainnya.</li> </ol> </li> <li>3. Mengembangkan moda transportasi dengan bahan bakar gas atau listrik; sepeda motor listrik dan mobil listrik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	
17.	<p><b>Bidang Keamanan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem keamanan Kearifan Lokal Tri Hita Karana dalam Perspektif Keamanan Nasional yang Berstandar Internasional untuk :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di objek wisata.</li> <li>2) Pintu masuk Bali.</li> <li>3) Jalur strategis.</li> <li>4) Kawasan strategis.</li> <li>5) Penyelenggaraan kegiatan/acara bertaraf internasional.</li> </ol> </li> <li>2. Mengembangkan unit reaksi cepat di wilayah strategis objek wisata.</li> <li>3. Membangun <i>Command Center</i> yang terintegrasi se-Bali.</li> <li>4. Mensinergikan penyelenggaraan keamanan; Polda Bali dan Kodam IX Udayana serta memberdayakan Pacalang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
18.	<p><b>Bidang Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membentuk Tim untuk menyusun kajian berkenaan dengan kontribusi wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik untuk Pemajuan Kebudayaan.</li> <li>2) Mengelola sebagian (dalam jumlah porsi tertentu) dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bali agar dapat dimanfaatkan secara terarah dan terfokus guna mendukung program prioritas sesuai dengan kebijakan Gubernur atau kebijakan bersama Gubernur dengan Bupati/Walikota. Pengelolaan dilakukan secara terbuka dan transparan oleh suatu badan yang dibentuk oleh Gubernur.</li> <li>3) Mewajibkan perusahaan yang menjadi peserta tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan provinsi Bali dan di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali agar memiliki cabang perusahaan di wilayah Bali sehingga pemerintah provinsi bisa meningkatkan perolehan dana bagi hasil dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</li> </ol> </li> <li>2. Menata dan memberdayakan Perusahaan Daerah (Perusda) provinsi Bali untuk mengelola unit usaha di bidang gas, air, aset, industri, investasi di bidang industri pariwisata dan industri lainnya.</li> <li>3. Membentuk Hub LNG di wilayah Gerokgak, Buleleng untuk distribusi LNG Jawa Timur dan Wilayah Indonesia bagian tengah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

# AGENDA PRIORITAS

## III. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM	SKEMA PENDANAAN	SKPD
18.	<p><b>Bidang Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Membentuk <i>Bali Incorporated</i> untuk mengintegrasikan seluruh unit usaha di Bali.</li> <li>5. Membangun <i>Bali Internasional Convention Center</i> (BICC).</li> <li>6. Pembentukan Tim untuk fasilitasi pembentukan <b>asosiasi</b> untuk mempercepat pengurusan HAKI bagi seniman, budayawan, dan pengerajin lokal Bali (bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Bali).</li> <li>7. Menata secara komprehensif jalur jalan by pass I Gusti Ngurah Rai agar menjadi hijau, indah, berbudaya dan bersih sebagai salah satu <b>ikon Bali</b>: dengan tanaman lokal Bali yang ditanam secara terpola, sesuai lanskap, dengan tiang listrik dan lampu yang berbudaya, serta penataan saluran drainase yang baik dan bersih. <b>Lomba desain melalui sayembara.</b></li> <li>8. Pengorganisasian para pengusaha/pelaku industri lokal Bali agar mampu berkolaborasi/bersinergi untuk mendapatkan prioritas dalam membangun perekonomian Bali, yang akan difasilitasi secara optimal oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.</li> <li>9. Menyiapkan Tim Gabungan (Pemda, TNI, Polri, masyarakat) untuk menyusun rencana aksi pembersihan sampah di wilayah sungai, danau, dan pantai serta sumber mata air lainnya dengan menetapkan lokasi pelaksanaan di masing-masing wilayah dalam rangka pelaksanaan <i>Danu Kertih, Segara Kertih</i> dan <i>Wana Kertih</i>.</li> <li>10. Menyiapkan Tim Gabungan untuk kampanye kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan dan media <b>“Bali bebas sampah plastik”</b>.</li> <li>11. Menyiapkan Tim Gabungan untuk menertibkan praktek-praktek tidak sehat/melanggar hukum di bidang pariwisata yang merusak citra pariwisata Bali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APBN</li> <li>2. APBD Pov.</li> <li>3. APBD Kab./Kota</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Sumber lain</li> </ol>	

## IV. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN/ACARA TEMATIK BERNUANSA BALI

Menyelenggarakan kegiatan/acara **tematik** bernuansa Bali untuk menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik guna meningkatkan tingkat hunian hotel dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Bali.

1. Menyelenggarakan festival buah salak di Kabupaten Karangasem (sesuai musim, sekali dalam satu tahun).
2. Menyelenggarakan festival buah jeruk di Kabupaten Bangli (sesuai musim, sekali dalam satu tahun).
3. Menyelenggarakan festival kopi di Kabupaten Bangli (sesuai musim, sekali dalam satu tahun).
4. Menyelenggarakan festival buah mangga di Kabupaten Buleleng (sesuai musim, sekali dalam satu tahun).
5. Menyelenggarakan festival kuliner Bali di Kota Denpasar (satu kali dalam setahun).
6. Menyelenggarakan pameran industri kerajinan rakyat Bali di Kota Denpasar (dua kali dalam setahun).
7. Menyelenggarakan Kejuaraan Atletik Internasional Bali Marathon di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana (satu kali dalam setahun).
8. Menyelenggarakan festival budaya tingkat internasional (satu kali dalam dua tahun).
9. Menyelenggarakan festival orang yang berekspresi unik (seperti festival tertawa atau *happiness*) tingkat internasional.

## V. METODE KERJA KELOMPOK AHLI

1. Tugas penyusunan legislasi dan program dibagi habis oleh Kelompok Ahli Bidang Pembangunan dan Bidang Hukum yang dibagi dalam beberapa tim sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan beban kerja.
2. Pembagian kelompok ahli ke dalam tim sesuai kompetensi dan minat.
3. Bekerja secara konsisten, tegak lurus, dan ajeg sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Bali 2018-2023.
4. Berkenaan dengan penyusunan kebijakan dan program agar selalu memakai pendekatan dari hulu sampai ke hilir, disusun secara sistemik, terpola, dan logik serta dapat diterapkan sesuai potensi Kabupaten/Kota di Bali.
5. Bekerja dalam kerangka pencapaian target pembangunan sesuai prioritas secara produktif dan terukur, bukan berdiskusi secara akademik tanpa ujung pangkal dan tanpa akhir.
6. Bekerja secara profesional dengan mengedepankan dedikasi yang berlandaskan pengabdian kepada pemerintah daerah demi rakyat Bali.
7. Bekerja secara kolektif dan bersinergi dengan semangat kebersamaan, antar kelompok ahli dan dengan Kepala OPD Provinsi Bali, tidak boleh mengedepankan egoisme.
8. Bekerja dengan memakai dasar peraturan PerUndang-Undangan, referensi, dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
9. Berkenaan dengan rumusan regulasi (revisi Undang-Undang, penyusunan Raperda, dan Rapergub) agar disusun dengan singkat, padat, jelas, dan tegas (*concious*) serta mudah dipahami logika pikir paling sederhana sehingga mudah diterima masyarakat.
10. Tim bekerja secara paralel dan menyelesaikan seluruh tugas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan target waktu.
11. Semua hal yang dikerjakan bersifat tertutup/rahasia, tidak boleh dipublikasikan atau dibicarakan dengan pihak lain tanpa seijin Gubernur.

## VI. PEMBENTUKAN TIM

### A. Tim Legislasi :

Tim Penyusun Naskah Akademik dan Draf Revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTT, dan NTB menjadi Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

1. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
2. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub).

### B. Tim Implementasi Visi Misi Gubernur

1. Tim Implementasi Visi Misi Gubernur menjadi Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

- 1) Bidang Pangan
- 2) Bidang Sandang
- 3) Bidang Papan
- 4) Bidang Pendidikan
- 5) Bidang Kesehatan
- 6) Bidang Jaminan Sosial
- 7) Bidang Ketenagakerjaan
- 8) Bidang Adat
- 9) Bidang Agama
- 10) Bidang Budaya
- 11) Bidang Pariwisata
- 12) Bidang Infrastruktur
- 13) Bidang Energi Listrik
- 14) Bidang Air Bersih
- 15) Bidang Perekonomian

## VI. PEMBENTUKAN TIM

- 17) Bidang Transportasi
- 18) Bidang Keamanan
- 19) Bidang Khusus
2. Tim Pendamping Penyusun APBD Semesta Berencana 2019 sebagai implementasi Visi Misi Gubernur (koordinasi dengan TAPD).
3. Tim Pendamping Penyusun RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 sebagai implementasi Visi Misi Gubernur (koordinasi dengan TAPD).
4. Tim Penyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Pencapaian Target RPJMD Semesta Berencana 2018-2023.
5. Tim Pendamping Persiapan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun.
6. Tim Penyusun Pembangunan SDM Bali Unggul.
7. Tim Pendamping Penyusunan Konsep Pendidikan Berbasis Keagamaan Hindu.
8. Tim Pengembangan Pendidikan SMK 4 Tahun, SMK Kewirausahaan, dan SMK BLUD.
9. Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB 2019.
10. Tim Pengkajian Komparasi Jaminan Kesehatan JKBM dan JKN/BPJS menuju format baru yaitu Jaminan Kesehatan KBS (Krama Bali Sehat).
11. Tim Penyusun Konsep Tatahan Kehidupan Krama Bali sesuai dengan ***Sad Kertih***.
12. Tim Penyusun Konsep/Program Pelindungan Kawasan Suci Besakih.
13. Tim Penyusun Program Festival Seni Modern.
14. Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB).
15. Tim Penyusun Konsep Pusat Kebudayaan Bali
16. Tim Penyusun Konsep Museum (Museum Tari, Museum Gamelan/Musik Bali, Museum Arsitektur Bali, Museum Tenun Bali, Museum Seni Rupa/Seni Lukis).
17. Tim Penyusun Standarisasi Pelayanan Kepariwisataaan.
18. Tim Penyusun Konsep Kontribusi Wisatawan untuk Pemajuan Kebudayaan.



## VI. PEMBENTUKAN TIM

19. Tim Penyusun Sistem Rekrutmen Pemandu Wisatawan/*Guide*.
20. Tim Penyusun Master Plan Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara yang terkoneksi dan terintegrasi.
21. Tim Studi Pengembangan Energi Listrik berbasis Gas dan/atau Energi Baru Terbarukan.
22. Tim Penyusun Konsep Tindaklanjut MoU Gubernur Bali dengan BPESDM, PT. Indonesia Power, PT. Pertamina, dan PT. PLN.
23. Tim Penyusun Master Plan Pengelolaan Air Bersih.
24. Tim Penyusun Konsep Pengembangan Perekonomian Bali.
25. Tim Penyusun Konsep Moda Transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi.
26. Tim Penyusun Konsep Keamanan berbasis *Tri Hita Karana*.
27. Tim Penyusun Rumusan Pelaksanaan Bidang Khusus.
28. Tim Penyusun untuk Menggerakkan Investasi.
29. Tim Pendamping Konsep Penyelenggaraan Kegiatan/Acara Tematik Bernuansa Bali.
30. Tim Penyusun Konsep Pembangunan Kebun Raya;
  - Taman Mangrove di Kawasan Tahura Ngurah Rai dan Benoa.
  - Kebun Raya di Kawasan Pura Dalem Balingkang, Bangli.
  - Kebun Raya di Buleleng.
  - Kebun Raya di Tabanan.
  - Kebun Raya di Badung.
  - Kebun Raya di Klungkung.
  - Kebun Raya di Karangasem.



***Matur Suksma  
Om Santih, Santih, Santih, Om***